

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

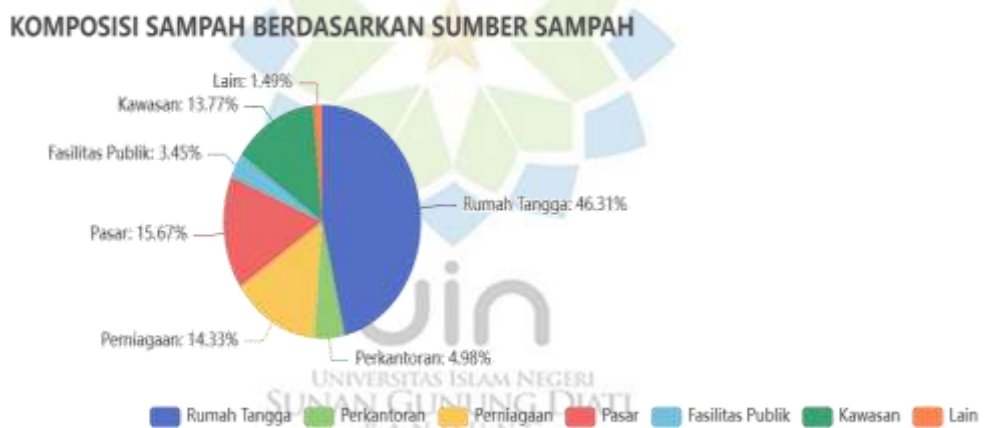
Di Indonesia, pencemaran lingkungan merupakan masalah yang terus terjadi saat ini dan menjadi permasalahan serius di berbagai pemerintahan Kabupaten/Kota terutama mengenai pengelolaan sampah yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta proses urbanisasi yang terus berkembang, volume sampah yang diperoleh juga mengalami peningkatan. *World Bank* (2025) memperkirakan bahwa produksi sampah akan mencapai 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan prasarana, sarana, serta standar pelayanan di bidang lingkungan dapat berdampak pada penurunan kualitas kesehatan lingkungan. Selain itu, permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan juga berkaitan dengan tingginya biaya operasional serta semakin terbatasnya ruang yang layak untuk dijadikan lokasi pembuangan. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbulan sampah di 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2024 mencapai 36,5 juta ton setiap tahunnya. Dari total volume sampah yang dihasilkan, hanya sekitar 1,36% yang berhasil dikurangi, sedangkan tingkat penanganan sampah mencapai 31,35%. Adapun sekitar 67,29% dari keseluruhan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Tidak hanya di kawasan perkotaan, produksi limbah juga dihasilkan di daerah pedesaan, terutama berupa sampah organik yang berasal dari aktivitas pertanian serta kegiatan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, permasalahan pengelolaan sampah juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Majalengka menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah. Volume timbulan sampah di wilayah ini diperkirakan mencapai 100 ton per hari seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan besarnya beban yang harus ditangani oleh pemerintah daerah

apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif dan terencana. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang tidak semata-mata berfokus pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga mengedepankan upaya pengurangan sampah sejak dari sumber melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meminimalkan ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Untuk memahami karakteristik timbulan sampah tersebut, diperlukan analisis mengenai komposisi sampah yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui jenis sampah yang mendominasi dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dan lebih efektif.

Berikut grafik data komposisi sampah berdasarkan sumber sampah di Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.1 Data Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Sumber: open data Majalengka, DLH, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, komposisi sampah di Kabupaten Majalengka didominasi oleh sampah rumah tangga sebesar 46%, diikuti oleh pasar, perumahan, kawasan, kantor, fasilitas publik, dan kategori lainnya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik. Sampah organik dapat dianggap sebagai jenis limbah yang ramah lingkungan, karena berpotensi diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna apabila pengelolaannya dilakukan dengan cara yang tepat (Febriadi, 2019). Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah secara terpadu untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan,

dan sosial ekonomi (Putri et al., 2025). Maka dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, diperlukan penanganan yang efektif terhadap permasalahan sampah, salah satunya melalui penerapan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan konsep 3R pada dasarnya diarahkan untuk menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya, meminimalkan potensi pencemaran lingkungan, memberikan nilai tambah bagi warga, serta diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah (Jumadil et al., 2023). Konsep 3R ini, yang mencakup pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, menjadi landasan utama bagi pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R).

Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah di tingkat komunitas atau kawasan yang dijalankan melalui keterlibatan masyarakat, dengan dukungan dan fasilitas dari pemerintah dalam kerangka pemberdayaan (Lawa et al., 2021). Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara tegas menyatakan bahwa upaya mengurangi sampah mulai dari sumbernya dengan konsep 3R merupakan langkah-langkah strategis yang wajib diterapkan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong terlaksananya program TPS 3R, salah satunya melalui penyusunan dan penerapan kebijakan atau regulasi yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan sampah berbasis peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menerapkan program TPS 3R dalam upaya pengelolaan sampah. Berikut merupakan data TPS 3R di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Tabel 1.1 Sebaran Lokasi TPS 3R di Kabupaten Majalengka

NO	LOKASI TPS 3R	KECAMATAN
1	Desa kutamanggu	Cigasong
2	Desa Cikijing	Cikijing
3	Desa Malausma	Malausma
4	Desa Ligung Lor	Ligung
5	Desa Jatitujuh	Jatitujuh
6	Desa Babakan Anyar	Kadipaten
7	Desa Rajagaluh Lor	Rajagaluh
8	Desa Sindangkerta	Maja
9	Desa Banjaran	Banjaran
10	Desa Kramat Jaya	Malausma
11	Desa Manjeti	Cigasong
12	Desa Mekarsari	Jatiwangi
13	Desa Sukaraja Kulon	Jatiwangi
14	Desa Karyamukti	Panyingkiran
15	Kelurahan Majalengka Kulon	Majalengka

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data di atas, tercatat bahwa saat ini terdapat 15 TPS 3R di Kabupaten Majalengka. Meskipun program TPS 3R telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar TPS 3R tersebut belum beroperasi secara optimal dikarenakan adanya kendala operasional. Upaya pengurangan sampah sejak dari sumber belum dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil observasi awal dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan program TPS 3R masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan belanja modal (*Capital Expenditure/CaPex*) seperti infrastruktur dan armada pengangkut sampah, serta belanja operasional

(*Operational Expenditure/OpEx*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi biaya transportasi dan upah personel pengangkut sampah. Selain itu, program TPS 3R juga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan memperkuat pelaksanaan di lapangan. Optimalisasi program TPS 3R tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya fisik dan finansial, tetapi juga bagaimana program tersebut dijalankan oleh aparatur pelaksana. Sejalan dengan kondisi tersebut, keterbatasan sarana operasional yang tersedia di lapangan seperti armada pengangkut sampah menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian program ini secara optimal. Berikut ini tabel data armada pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Majalengka.

Tabel 1.2 Ketersediaan Armada Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	JENIS ARMADA PENGANGKUT	JUMLAH UNIT	FUNGSI ARMADA
1	Pickup	1	Pengangkutan sampah skala kecil
2	Motor	2	Mengangkut sampah dari gang atau jalan sempit
3	Truk	13	Mengangkut sampah dari TPS menuju TPA atau tempat pengolahan
Total		16	

Sumber: Opendata Majalengka Dinas Lingkungan Hidup, Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat jelas bahwa jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan volume sampah yang harus dikelola setiap harinya. Dengan hanya memiliki 1 unit mobil pickup, 2 unit motor, dan 13 unit truk, kapasitas yang ada belum dapat menjangkau semua wilayah di Kabupaten ini yang terdiri dari 26 Kecamatan. Keterbatasan tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan pengangkutan sampah, terutama di wilayah yang lokasinya cukup jauh dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun

dari TPS 3R yang aktif. Akibatnya, sebagian besar sampah masih menumpuk di sumbernya atau dikelola oleh masyarakat secara mandiri dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya berpengaruh pada aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi keterbatasan tersebut juga berhubungan langsung dengan kinerja serta motivasi pegawai sebagai pelaksana program di lapangan. Dalam situasi fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, aparaturnya dituntut untuk bekerja lebih efisien, melakukan pembagian tugas secara tepat, dan memastikan pelayanan persampahan tetap berlangsung tanpa hambatan. Kondisi tersebut menuntut kinerja yang lebih tinggi agar proses pengumpulan dan pengangkutan sampah tetap berjalan, sekaligus memerlukan motivasi yang kuat agar pegawai tetap berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, keterbatasan fisik yang ada justru menegaskan betapa pentingnya peran kinerja dan motivasi aparaturnya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program TPS 3R di Kabupaten Majalengka.

Dalam pelaksanaan program pemerintah, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sarana maupun prasarana tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Dengan adanya kesenjangan dalam pengelolaan sampah tersebut, peran Sumber Daya Manusia sangat penting. Jika kualitas sumber daya manusia berada pada tingkat yang baik, maka kinerja pegawai tersebut akan turut meningkat (Dharma & Mayasari, 2025). Oleh karena itu, penting untuk melihat kondisi SDM yang terlibat secara langsung. Berikut disajikan data jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	52
2	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	11
3	PPPK PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu)	161
4	PHL (Pegawai Harian Lepas)	16
Total		240

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terdiri atas berbagai status kepegawaian, meliputi PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta Pegawai Harian Lepas (PHL). Susunan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program TPS 3R tidak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara, tetapi juga melibatkan tenaga non-ASN yang berkontribusi langsung dalam aktivitas operasional di lapangan. Dengan demikian, capaian program TPS 3R sangat ditentukan oleh tingkat kinerja dan motivasi seluruh aparatur, baik ASN maupun non-ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Kinerja aparatur mencerminkan sejauh mana tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif, responsif, dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan (Elnanda, 2024). Di sisi lain, motivasi menjadi faktor pendorong yang memengaruhi tingkat kesungguhan, komitmen, dan konsistensi pegawai dalam melaksanakan program. Apabila kinerja dan motivasi aparatur belum berada pada tingkat yang optimal, pelaksanaan program berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan program tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana aparatur menjalankan perannya secara produktif, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pencapaian tujuan program. Dengan demikian, beragam faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi tingkat optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R menuntut adanya identifikasi permasalahan secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam perumusan dan penyusunan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang melandasi pelaksanaan penelitian ini. Yang mana, bukan hanya ada kendala, tetapi belum diketahui ukuran pasti terkait pengaruh kinerja dan motivasi aparatur terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R. Permasalahan pokok berkaitan dengan peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Majalengka yang telah mencapai sekitar 100 ton per hari. Sementara dalam upaya pengelolaannya, khususnya melalui pelaksanaan program TPS 3R belum sepenuhnya berjalan secara optimal meskipun jumlah TPS 3R tersedia di beberapa kecamatan. Di samping itu,

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama ketersediaan armada pengangkut sampah masih menjadi hambatan dalam menjangkau cakupan pelayanan secara menyeluruh dan merata. Keterbatasan sarana dan prasarana belum sepenuhnya menjelaskan rendahnya optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R sehingga faktor non teknis khususnya kinerja dan motivasi perlu dianalisis. Di sisi lain, kinerja dan motivasi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup tidak dimaknai sebagai kondisi yang kurang baik, melainkan sebagai elemen strategis yang berpengaruh dalam menentukan tingkat optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R. Hingga saat ini, belum terdapat kajian empiris terkait dengan pengaruh kinerja dan motivasi pegawai terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R di Kabupaten Majalengka, sehingga belum diketahui secara pasti sejauh mana kinerja dan motivasi aparatur berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program TPS 3R. Meskipun program TPS 3R telah tersedia secara kebijakan dan kelembagaan, pelaksanaan di Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dan capaian implementasi di lapangannya.

Oleh karena itu, kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas di lapangan inilah yang menunjukkan adanya masalah pokok yang perlu dikaji, yaitu sejauh mana kinerja dan motivasi berpengaruh terhadap optimalisasi program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja dan Motivasi Aparatur Terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Program Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.”**

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kinerja aparatur terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka?

2. Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka?
3. Seberapa besar pengaruh kinerja dan motivasi aparatur terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja aparatur terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
3. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kinerja dan motivasi aparatur terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan serta memiliki nilai kebermanfaatan yang luas bagi berbagai kalangan masyarakat. Adapun bentuk manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis (*Theoretical Significance*)

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan kinerja aparatur, motivasi kerja, serta optimalisasi program pelayanan publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dan teori motivasi Herzberg dalam konteks organisasi publik, terutama pada instansi pemerintah daerah yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan acuan yang berguna bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemerintah, terutama program yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran untuk mendukung penguatan teori dan konsep yang relevan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi di sektor publik.

2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di daerah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai sekaligus memperkuat motivasi kerja mereka, sehingga pelaksanaan program TPS 3R dapat berjalan lebih optimal. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bersifat strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dipilih sebagai acuan maupun bahan perbandingan untuk mengembangkan kajian serupa yang menelaah keterkaitan antara kinerja, motivasi, dan optimalisasi program pelayanan publik, baik di bidang lingkungan hidup maupun sektor lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menggambarkan hubungan teoritis antara variabel independent, yaitu kinerja dan motivasi, dengan variabel dependen berupa optimalisasi program TPS 3R. Mengacu pada pendapat (Sugiyono, 2017), kerangka pemikiran perlu menjelaskan pertautan antar variabel secara teoritis sehingga hubungan yang diuji dapat dipahami secara sistematis.

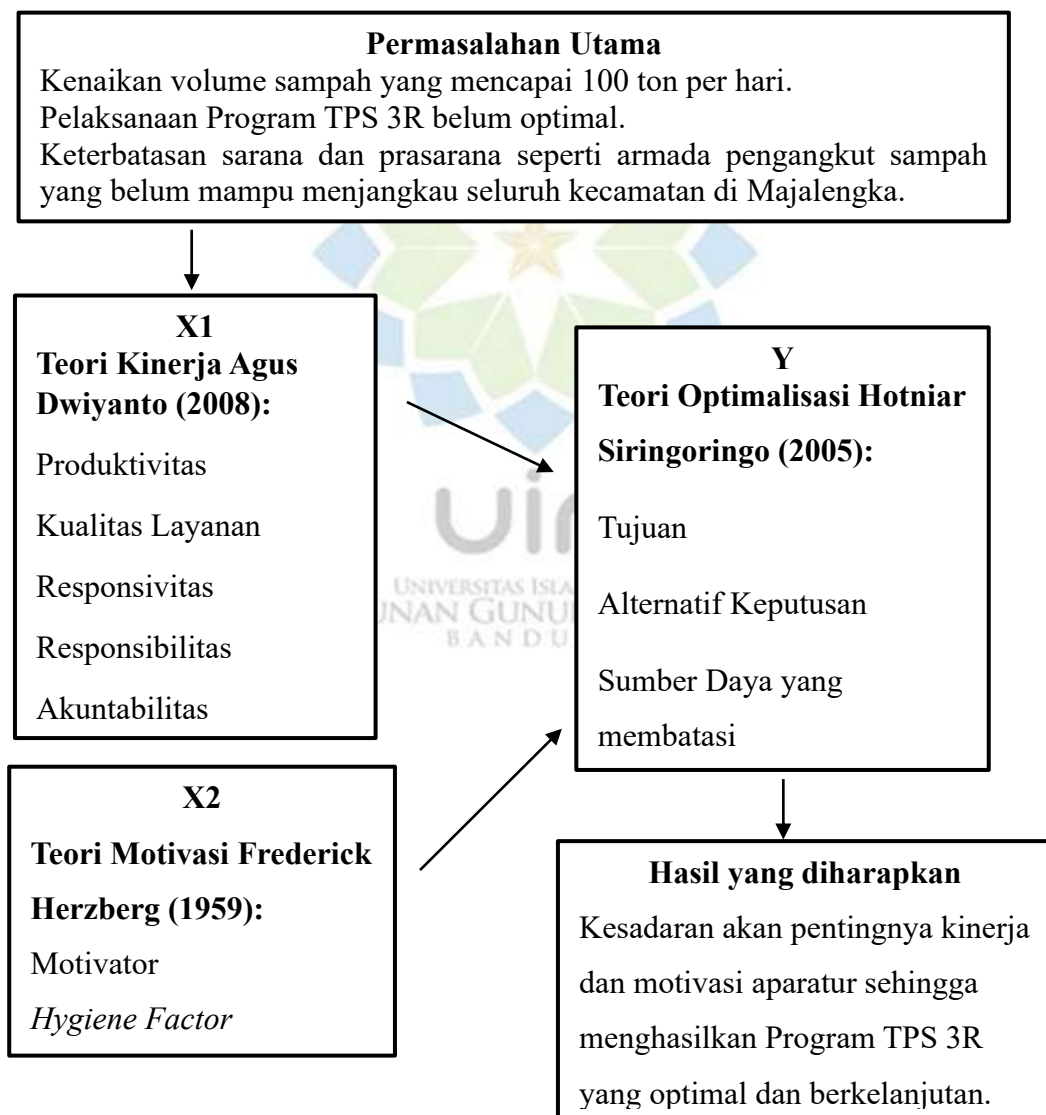
Pada variabel kinerja, penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam (Elnanda, 2024), yang memandang kinerja sebagai capaian kerja yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi publik selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan lima indikator utama yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, variabel motivasi dijelaskan melalui teori Frederick Herzberg pada tahun 1959 yaitu dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan individu untuk berperilaku dan bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Herzberg membagi motivasi ke dalam dua faktor, yaitu faktor motivator dan *hygiene factor*. Keduanya berperan dalam menentukan dorongan individu untuk bekerja secara maksimal. Sementara itu, variabel optimalisasi program TPS 3R mengacu pada teori Hotniar Siringoringo (2005) dalam (Mutiara Bahar & Wahyudi, 2024), yang mendefinisikan optimalisasi sebagai proses memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kegiatan melalui tiga indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi, agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan pemanfaatan sumber daya secara tepat.

Dalam pelaksanaan program publik, keberhasilan pelaksanaan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan maupun sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Kinerja aparatur mencerminkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas secara produktif, responsif, bertanggung jawab, dan akuntabel sehingga berkontribusi terhadap tercapainya tujuan program. Di sisi lain, motivasi menjadi faktor pendorong yang memengaruhi semangat, komitmen, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan tugas secara optimal. Dengan demikian, semakin baik kinerja dan semakin tinggi motivasi aparatur, maka semakin besar pula peluang tercapainya optimalisasi pelaksanaan Program TPS 3R. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti sarana, prasarana, dan anggaran, tetapi juga oleh faktor perilaku organisasi yang tercermin melalui kinerja dan motivasi aparatur.

Berdasarkan ketiga landasan teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa kinerja pegawai dan motivasi kerja memiliki peranan penting dalam menentukan tercapainya optimalisasi program TPS 3R yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara variabel-variabel tersebut dibangun dalam kerangka berpikir untuk menggambarkan bagaimana kinerja dan motivasi dapat memengaruhi keberhasilan program TPS 3R di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.2 Model Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti (2025)

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$; tidak ada pengaruh yang positif antara variabel kinerja (X1) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)
 $H_a : \beta_1 \neq 0$; ada pengaruh yang positif antara variabel kinerja (X1) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)
2. $H_0 : \beta_2 = 0$; tidak ada pengaruh yang positif antara variable Motivasi (X2) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)
 $H_a : \beta_2 \neq 0$; ada pengaruh yang positif antara variable Motivasi (X2) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)
3. $H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$; tidak ada pengaruh yang positif antara variable kinerja (X1) dan motivasi (X2) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)
 $H_a : \beta_1 \beta_2 \neq 0$; ada pengaruh yang positif antara variable kinerja (X1) dan motivasi (X2) terhadap optimalisasi pelaksanaan program TPS 3R (Y)